



Pengaruh Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Walikota Padang

Ali Yusro^{1*}, Salfadri², Andre Bustari³

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

²Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

³Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: aliyusro39@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang pengaruh pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja di Kantor Walikota Padang. Pengolahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan model regresi berganda. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian melalui kuesioner yang disebar. Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan purpusive sampling. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengendalian akuntansi berpengaruh secara parsial dan positif terhadap akuntabilitas kinerja dengan nilai signifikan α ($0,000 < 0,05$). Variabel sistem pelaporan berpengaruh secara parsial dan positif terhadap akuntabilitas kinerja dengan sig α ($0,001 < 0,05$). Variabel pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, hal ini terlihat dari nilai signifikan α ($0,000 < 0,05$) pada Kantor Walikota Padang Berdasarkan hasil penelitian ini, maka sebaiknya pegawai kantor Walikota Padang hendaknya memperhatikan pengendalian akuntansi dan system pelaporan sebagai bahan masukan dan pertimbangan. Hal tersebut dilakukan agar dapat tercapai suatu akuntabilitas kinerja yang sangat memuaskan atau mendapatkan predikat “AA” dengan skor 90-100 dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kata Kunci: Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Akuntabilitas Kinerja

Abstract: This study examines the influence of accounting controls and reporting systems on performance accountability at the Padang Mayor's Office. The data processing used a multiple regression model. The data source was primary data obtained directly from respondents through distributed questionnaires. The sample was drawn using a purposive sampling technique. The analysis results indicate that accounting controls have a partial and positive effect on performance accountability, with a significance value of α ($0.000 < 0.05$). The reporting system has a partial and positive effect on performance accountability, with a significance value of α ($0.001 < 0.05$). Accounting controls and reporting systems simultaneously influence performance accountability, as evidenced by the significance value of α ($0.000 < 0.05$) at the Padang Mayor's Office. Based on the results of this study, Padang Mayor's Office employees should consider accounting controls and reporting systems as input and consideration. This is done to achieve highly satisfactory performance accountability, or to obtain an "AA" rating with a score of 90-100 in the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) assessment.

Keywords: Influence of Accounting Control, Reporting System, Performance Accountability

PENDAHULUAN

Prinsip akuntabilitas diterapkan antara lain melalui langkah-langkah pelaporan pemerintah mengenai rencana anggaran tahunan dan evaluasi bersama atas kinerja keuangan instansi, penyampaian laporan keuangan pada RUPS Tahunan, pembentukan Audit Internal dan penunjukan auditor eksternal, serta pemberlakuan etika bisnis dan pedoman perilaku (Mardiasmo, 2016:83). Akuntabilitas kinerja pemerintah dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa organisasi bertanggungjawab dan untuk apa instansi bertanggungjawab. Dalam arti luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*). Akuntabilitas berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dalam sebuah rantai komando organisasi (Supriyono, 2018:58).

Kota Padang kembali berhasil meraih predikat dengan kategori BB yang artinya mendapatkan nilai 75 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia sebagai hasil dari evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Padang Tahun 2018. Namun kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan karena semakin banyaknya instansi pemerintah kelihatan tidak peduli terhadap upaya perbaikan kinerja yang lebih efisien karena masih banyaknya kinerja instansi pemerintah yang belum menunjukkan peningkatan signifikan. Keadaan tersebut menyebabkan semakin meningkatnya tuntutan yang diajukan masyarakat kepada pemerintah atas pelayanan public yang lebih baik.

Berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah tersebut. Laporan keuangan juga dapat dijadikan sebagai dasar pertanggungjawabannya terhadap publik (Mahsun, 2016:11)

Untuk mencapai terwujudnya akuntabilitas kinerja yang baik ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah pengendalian akuntansi juga berfungsi sebagai satu kesatuan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik. Pengendalian akuntansi akan membantu instansi membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif dalam keberhasilan dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja. Menurut Mardiasmo (2016:87) peningkatan perencanaan dan pengendalian terhadap aktivitas dengan cara perbaikan sistem akuntansi diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi efisiensi serta efektivitas, terutama dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja organisasi.

Saat ini, Pemerintah Kota Padang memiliki pencapaian program pengendalian akuntansi seperti, sumber dari dokumen rencana kinerja dan tahunan (RKT) yang target indikatornya disesuaikan dengan kondisi keuangan (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sensus barang daerah, Peningkatan pengelolaan penerimaan retribusi.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja, adalah sistem pelaporan. Sistem pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggung jawabkan Sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggungjawaban. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Instansi berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan

ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga mewujudkan akuntabilitas kinerja sector publik (LAN, 2017:154).

Birokrasi Pemerintah Kota Padang juga masih belum menunjukkan kinerja yang diharapkan. Berbagai persoalan yang dihadapi seperti Ketatalaksanaan masih belum didukung oleh sistem informasi yang berbasis kepala teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan. Standard Operating Prosedures (SOP) yang sudah dirancang belum dilaksanakan secara optimal. Dalam pengembangan Sumber Daya Aparatur (SDA) masih belum mencerminkan terbentuknya aparatur yang professional, masalah rekrutmen pegawai yang belum sepenuhnya didasarkan atas formasi yang dibutuhkan sehingga dalam jangka panjang jika tidak dikembangkan secara baik akan menjadi beban daerah, dan penempatan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan serta pembenahan manajemen SDA menjadi tuntutan yang mutlak untuk mewujudkan birokrat yang kompeten (Lakip-kota-padang, 2020).

METODE PENELITIAN

(Method) untuk memperoleh informasi yang sebaik-baiknya dengan asumsi agar sasaran dalam penulisan dapat tercapai penulis akan menggunakan metode penelitian lapangan dan kepustakaan. Teknik pengumpulan data penelitian ini dokumentasi, wawancara, kuesioner. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer melalui Kuesioner disebar dan sekaligus dikumpulkan langsung oleh peneliti. Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berasal dari pegawai kantor Walikota Padang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor Walikota Padang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan didapatkan Sampel yang seluruh pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan yang berjumlah 42 pegawai Kantor Walikota Padang. Analisis penelitian ini menggunakan Regresi linear berganda untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari dua menggunakan program SPSS 26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan maksud memeriksa apakah terdistribusi normal atau tidak

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas		
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std.Deviation	3.41962400
Most Extreme Differences	Absolute	.100
	Positive	.089
	Negative	-.100
Test Statistic		.100
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Dari Tabel 1 diketahui bahwa nilai Asym.Sig (2-tailed) untuk unstandardized residual sebesar 0,200 > 0,05, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian berdistribusi normal, dengan demikian analisis regresi linear berganda dapat dilaksanakan karena data telah berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Table 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pengendalian Akuntansi	0.127	7.857	Tidak Multikolinearitas
Sistem Pelaporan	0.127	7.857	Tidak Multikolinearitas

Nilai *tolerance* dari *Collinearity Statistics* mendekati 1 (satu) dan nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) untuk semua variabel bebas di bawah 10 (sepuluh). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang berarti antara sesama variabel bebas. Data hasil penelitian ini tidak mengalami kasus multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Table 3 Uji Heterokedastisitas

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	3.086	2.058		1.499	.142
Pengendalian Akuntansi	-.038	.074	-.234	-.523	.604
Sistem Pelaporan	.052	.117	.200	.448	.657

a. Dependent Variable: Abs_res

Dari tabel diatas, dapat diperoleh hasil bahwa Pengendalian Akuntansi dengan variabel absolut / Ut adalah 0,604, korelasi rank Spearman antara Sistem Pelaporan dengan absolute adalah 0,657. Jadi Pengendalian Akuntansi $0,604 > 0,05$ dan Sistem Pelaporan $0,657 > 0,05$ itu berarti bahwa masalah heterokedastisitas tidak terjadi karena nilai rank spearman nya besar dari $\alpha = 0,05$.

4. Regresi Linear Berganda

Table 4 Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	3.922	3.223		1.217	.231
Pengendalian Akuntansi	.553	.115	.557	4.799	.000
Sistem Pelaporan	.669	.183	.425	3.655	.001

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

1. Nilai konstanta sebesar 3,922 yang berarti bahwa jika tidak ada variabel pengendalian akuntansi (PA) dan sistem pelaporan (SP), yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja (AK), maka besarnya akuntabilitas kinerja adalah 3,922 satuan.
2. Variabel pengendalian akuntansi (PA) mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja (AK), dengan koefisien regresi pengendalian akuntansi dari perhitungan linier berganda dapat dilihat sebesar 0,553 maksudnya adalah jika setiap kenaikan 1 satuan pengendalian akuntansi (PA) akan menyebabkan meningkatnya akuntabilitas kinerja (AK) sebesar 0,553 satuan, asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.

3. Variabel sistem pelaporan (SP) mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja, dengan koefisien regresi sebesar 0,669, yang artinya apabila sistem pelaporan (SP) meningkat sebesar 1 satuan, maka akuntabilitas kinerja (AK) akan meningkat sebesar 0,669 satuan dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.

5. Uji Koefisiensi Determinasi

Table 5 Koefisien Determinan

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.966 ^a	.933	.930	3.506

a. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi

Besar nya nilai adjusted R^2 sebesar 0,933 yang berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 93,3% sedangkan sisanya 6,7 % dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

6. Uji t

Table 6. Uji t

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	3.922	3.223		1.217 .231
	Pengendalian Akuntansi (PA)	.553	.115	.557	4.799 .000
	Sistem Pelaporan (SP)	.669	.183	.425	3.655 .001

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

Hasil perhitungan yang didapat pengendalian akuntansi secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai lebih kecil dari α ($0,000 < 0,05$). Sedangkan nilai t hitung $X_1 = 4,799$ dan t tabel sebesar 2,022 sehingga $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($4,799 > 2,022$). Maka H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pada kantor Walikota Padang.

Variabel sistem pelaporan secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai lebih kecil dari α ($0,001 < 0,05$). Sedangkan nilai t hitung $X_2 = 3,655$ dan t tabel sebesar 2,022 sehingga $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($3,655 > 2,022$). Maka H_2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Walikota Padang.

7. Uji F

Table 7. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6680.172	2	3340.086	271.695	.000 ^b
	Residual	479.447	39	12.294		
	Total	7159.619	41			
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja						
b. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi						

Berdasarkan tabel di atas nilai F hitung diperoleh 271.695 dengan tingkat signifikansi 0,000, karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima dan nilai F hitung $> F$ tabel ($271.695 > 3,23$) dengan nilai F tabel df: F (k ; n-k) atau F (2; 42-2) = 3,23. Dapat disimpulkan bahwa pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan, berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Pembahasan

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, maka data hasil penelitian disajikan dan dianalisa sesuai dengan tujuan penelitian yang diajukan sebagai berikut:

1) Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh positif pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja. Semakin tinggi pengendalian akuntansi maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. pengendalian akuntansi (*accounting control*) adalah prosedur yang di gunakan untuk menjamin akurasi dalam fungsi penyimpanan catatan(transaksi keuangan) tujuannya adalah untuk membuat sumber data tertentu di tempatkan pada sistem yang baik dan benar. Dengan adanya pengendalian akuntansi maka suatu instansi pemerintah dapat, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Hal ini sesuai dengan teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau principal) memperkerjakan orang lain (agen) untuk melaksanakan sejumlah jasa mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen itu. Hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu terjadinya informasi asimetri (*asymmetry information*) dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemiliknya dan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Upaya untuk mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh principal maupun agent. Jensen & Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. Pemerintah daerah sebagai agent yang memiliki informasi lebih banyak daripada pemerintah pusat dan rakyat selaku principal sehingga dapat memunculkan asimetri informasi. Pengendalian akuntansi merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir asimetri informasi dengan cara *bonding cost*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harianto, (2021) pengaruh Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Mikoshi (2020) secara parsial (individu) pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Koni Se Sumatera Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama, (2019) juga didapatkan hasil bahwa Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kab. Padang Pariaman.

2) Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh positif sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja. Dengan adanya sistem pelaporan dengan pertanggungjawaban yang baik akan memberikan informasi yang handal, sehingga kinerja

instansi dapat dimonitor dengan baik. Hal ini memberikan gambaran bahwa semakin cepat sistem pelaporan maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja pemerintah dan sebaliknya semakin rendah sistem pelaporan maka akan semakin rendah akuntabilitas kinerja pemerintah. Sistem pelaporan yang baik dapat memantau dan mengendalikan kinerja aparat dalam mengimplementasikan anggaran yang ditetapkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Harianto, (2021) mengatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian Widaryanti & Pancawardani (2020) didapatkan hasil bahwa sistem Pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama, (2019) didapatkan hasil bahwa Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kab. Padang Pariaman.

3) Pengaruh Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja

Dapat disimpulkan bahwa pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tergantung pada pengendalian akuntansi, hal tersebut dikarenakan adanya penguat dalam pengendalian internal yaitu dalam menjaga aktiva dan menjamin akurasi dan daya andal dalam catatan keuangan, dilihat dari opini yang menyatakan masih menemukan beberapa pendukung dalam sistem pengendalian internal. Adanya penyusunan sistem pelaporan yang baik akan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Padang, hal itu disebabkan karena dengan adanya sistem pelaporan yang baik akan menciptakan pengelolaan yang transparan dan akuntabel sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mikoshi (2020) Secara simultan (bersama-sama) uji signifikansi nilai F menunjukkan hasil keputusan hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Koni Se Sumatera Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti, (2020) didapatkan hasil bahwa pengaruh kejelasan tujuan anggaran, pengendalian internal, dan sistem pelaporan secara parsial dan simultan memengaruhi dan secara signifikan memengaruhi kinerja instansi pemerintah.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisa data, interpretasi hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada kantor Walikota Padang
2. Variable sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Walikota Padang.
3. Variabel pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pimpinan Kantor Walikota Padang hendaknya memperhatikan pengendalian akuntansi dan system pelaporan sebagai bahan masukan dan pertimbangan. Hal tersebut dilakukan agar

- dapat tercapai suatu akuntabilitas kinerja yang sangat memuaskan atau mendapatkan predikat “BB” dengan skor 70-80 dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Akuntabilitas kinerja pada Kantor Walikota Padang sudah baik, dengan tingginya pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Kantor Walikota Padang diharapkan tetap mempertahankan keberhasilan pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan Kantor Walikota Padang.

REFERENSI

- Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 9.
- Hariato, D., Kennedy, & Zarefar, A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Akip) (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6.
- LAN. (2017). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta.
- Mahsun. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mikoshi, M. S. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4.
- Pratama, R., Agustin, H., & Taqwa, S. (2019). Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1.
- Supriyono. (2018). *Akuntansi Keprilakuan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Widaryanti, & Pancawardani, N. L. (2020). Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Fokus Ekonomi*, 15.